

Implementasi Kebijakan E-SAKIP Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado

Priska Sahoming¹
Johny Lumolos²
Fanley Pangemanan³

Abstrak

Implementasi kebijakan SAKIP muncul dalam rangka menyelenggarakan pemerintah yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) sekaligus sebagai pemenuhan atas tuntutan publik terhadap kuntabilitas kinerja. Pemerintah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem anggaran dan sistem akuntansi pemerintahan yang mulai diberlakukan sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Walikota Manado Nomor 22A Tahun 2014 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Manado Dengan Aplikasi e-Musrenbang, e-Monev dan e-Sakip. Di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado selama ini menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam bentuk Elektronik (E-Sakip) yang belum diketahui manfaat dan hasil capaian kinerjanya, sehingga penelitian ini menggunakan fokus teori implementasi kebijakan publik menurut George Edward III dengan variabel Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, manfaat E-Sakip pada Dinas Pengendalian penduduk dan KB Kota Manado ialah dapat mempermudah pemantauan dan pengendalian kinerja-kinerja sehingga telah sesuai dengan salah satu tujuan Sakip yakni menerapkan prinsip-prinsip Good Governance, kemampuan dalam pengelolaan data pengukuran kinerja ASN yang ada di Dinas PPKB yang meningkat dapat di kategorikan Baik meskipun gangguan internet yang menjadi kendala dalam proses penginputan data. Diharapkan bagian organisasi dan kepegawaian sekretariat daerah Kota Manado mengadakan pelatihan seperti workshop agar manfaat dan pengukuran kinerja di instansi lainnya bisa terlihat.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, SAKIP

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Beberapa permasalahan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) peneliti dapat mengidentifikasi diantaranya, yaitu: dalam pelaksanaan manajemen kinerja kelihatannya masih berorientasi pada “output” daripada “outcome”, Kualitas perencanaan kinerja belum menggambarkan alur logika program dan kinerja yang logis, Penetapan kinerja baik kinerja utama maupun kinerja sasaran atau kinerja program belum berorientasi hasil (outcome), belum optimalnya evaluasi kinerja internal yang dilakukan serta dibahas dalam Lakip, belum dimanfaatkannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan manajemen kinerja pada periode berikutnya.

Dari kelemahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) yang ditemui di atas, peneliti ingin mendalami sejauh mana produk teknologi yang saat ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Manado khususnya aplikasi yang disebut Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-Sakip). karena sistem ini katanya dapat mengukur keberhasilan maupun kegagalan program dan kegiatan serta dapat melakukan evaluasi tingkat capaian kinerja instansi pemerintah. Pada hakekatnya Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-Sakip) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu

sistem akuntabilitas yang memadai untuk melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi (LAN & BPKP, 2000: 63). Spesifikasinya pelaksanaan Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-Sakip) di Kota Manado merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisar dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja pemerintah. Kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Walikota Manado Nomor 22A Tahun 2014 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Manado Dengan Aplikasi e-Musrenbang, e-Monev dan e-Sakip.

Dukungan aplikasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-Sakip) sejak tahun 2016 hingga kini, sepenuhnya telah dianggarkan oleh instansi lokus penelitian dilengkapi dengan realisasi keuangan. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Diterbitkannya Peraturan Presiden dan Peraturan Walikota Manado yang telah dijelaskan di atas tentang Sistem Akuntabilitas

mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pada masing-masing instansi. Pertanggungjawaban yang dimaksud sebagai laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing. E-Sakip telah di manfaatkan oleh pemerintah kota manado sejak tahun 2014 yang mempunyai fungsi, antara lain: pertama penyusunan rencana hendaknya didasarkan pada hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan kinerja secara berkelanjutan, dan kedua menyusun target pertahun dan pertriwulan, ketiga tingkat capaian target relatif dengan tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui manfaat dan hasil capaian kerja yang saat ini sudah berbasis Elektronik. sebab itu peneliti mengambil judul “Implementasi Kebijakan e-Sakip dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana”.

Tinjauan Pustaka

Implementasi merupakan suatu keputusan untuk mencapai sasaran tertentu, maka untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut diperlukan serangkaian aktivitas pelaksanaan, mengingat bahwa implementasi suatu program merupakan suatu hal yang kompleks karena banyaknya faktor yang saling mempengaruhi dan terkait, maka untuk memahami adanya perbedaan antara apa yang diharapkan tercapai dengan yang terjadi kemudian menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya studi-studi implementasi.

Implementasi juga diartikan sebagai realisasi dari rencana yang ditetapkan sebelumnya. Lebih lanjut Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa: ”Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan (Wahab, 2008:65).

Tindakan-tindakan keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa segala sumber dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan, didalamnya mencakup: manusia, dana, dan kemampuan organisasi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta serta individu atau kelompok. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak aktualnya. Sedangkan menurut pendapat Bardac dalam ismail mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu sistem pengendalian untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan kebijakan.

Implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program itu dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu. Disamping itu, implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut.

Kebijakan secara etimologi istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris "policy". Pendapat Anderson yang dikutip oleh Wahab, merumuskan kebijaksanaan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (Anderson dalam Wahab, 2008:2). Oleh karena itu kebijakan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang di hadapi.

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Implementasi menurut kamus Webster merumuskan bahwa istilah toimplement (mengimplementasikan) itu berarti to provide the means for carryng out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) ; to give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dalam pandangan ini implementasikan dapat diartikan sebagai proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam

bentuk untuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif, dan dekrit presiden. (Wahab 2012:135).

Implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut dalam komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

a.Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group).

b.Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kualitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan.

c.Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan.

d.Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri, Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui

Standar Operating Procedur (SOP).
(Dwiyanto, 2017:31).

Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn

Implementasi kebijakan dari Meter dan Horn menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan.

Variabel yang terdapat sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan, pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.

2. Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal.

3. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkn implementasi kebijakan dengan kinerja baik.

4. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dirancang untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunika su antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program/kebijakan.

5. Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.

6. Lingkungan Sosial, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan

dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.

7. Sikap Pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini. (Dwiyanto, 2017:38).

2.4 Konsep Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah rangkaian proses yang sistematis dari berbagai komponen, alat dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja, yaitu perencanaan, penetapan kinerja dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. (Wahyudi 2011 : 2)

Sistem merupakan suatu cara tertentu dan biasanya dilakukan berulang untuk melaksanakan suatu serangkaian aktivitas. Sejumlah karakteristik sistem yakni lebih kurang membentuk ritme tertentu, terkoordinasi, dan mengulang serangkaian tahap tertentu (Anthony dan Govindarajan, 2002).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara tringulasi (gabungan), analisis dan bersifat

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul analisisnya lebih bersifat kualitatif. Sugiyono, (2017:9). Dalam mempertajam penelitian kualitatif menetapkan fokus. Spradley mengatakan bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Sugiyono (2017:209). Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada bagaimana implementasi program pemerintah dalam hal ini Program Keluarga Harapan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Manado. Dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Implementasi kebijakan menunjuk beberapa indikator yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial, sikap pelaksana. Peneliti akan mewawancarai beberapa narasumber yang mampu memberikan informasi, adalah:

1. Dinas Sosial kota Manado (Kepala Bagian dan Staff Penanganan PKH) : 2 Orang
 2. Pendamping PKH Kecamatan Tuminting kota Manado : 2 Orang
 3. Masyarakat yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan : 3 Orang
 4. Masyarakat yang memenuhi syarat untuk menerima PKH tetapi tidak mendapat Bantuan sosial : 3 Orang.
- Informan berjumlah 10 orang

Hasil Penelitian

Lahirnya SAKIP adalah berasal dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi

Pemerintah yang selanjutnya Diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP dimana didalamnya disebutkan mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok yang kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Walikota Manado Nomor 22 A Tahun 2014 Tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Manado Dengan Aplikasi e-Musrenbang, e-Monev dan e-Sakip. Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategik dan berakhir pada pengukuran kinerja atas kegiatan, program dan kebijaksanaan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah tanggapan Ibu IWP selaku Kepala Sub bagian Perencanaan tentang bagaimana Implementasi e-Sakip di Dinas Pengendalian Penduduk bahwa: “dengan adanya e-Sakip di Dinas PPKB maka sistem kerja jadi lebih terukur dan bermanfaat sehingga dapat meraih hasil yang jelas” Dalam Pelaksanaan SAKIP di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado maupun SKPD lainnya pada setiap tahunnya diadakan pelaporan dalam bentuk LAKIP yang dilaporkan kepada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado. Dalam Pelaksanaan SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Manado untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas terdapat beberapa tahapan-tahapan yang terkait sebagai

berikut: 1. Rencana Strategis 2. Perjanjian Kinerja 3. Pengukuran Kinerja 4. Pengelolaan Kinerja 5. Pelaporan Kinerja 6. Review dan Evaluasi Kinerja. Dalam Implementasi SAKIP, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat, merupakan panduan dari strategic management dan strategic thinking yang dinamis. Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Rencana Strategis unit Eselon II di Seluruh SKPD khususnya Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Manado memuat visi, misi, kebijakan, tujuan, sasaran, indikator serta target realisasi tahunan dan program tahunan serta mengacu pada Rencana Strategis Dinas PPKB. Penyajian informasi tentang hasil (outcome) dan keluaran (output), maupun sumber daya yang tercantum di dalam dokumen Rencana Strategis ini bersifat indikatif.

Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD

1. Tahap Pertama: Mempelajari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. Kepala SKPD mengkaji implikasi visi, misi, dan program calon Kepala Daerah terpilih, terhadap tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

2. Tahap Kedua: Menyusun Rancangan Renstra SKPD

Kepala SKPD menyusun rancangan Renstra SKPD berpedoman pada rancangan awas RPJM Daerah yang telah disepakati bersama.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam SAKIP yang termuat dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

1. Pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja

2. Pemerintah Daerah menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota.

3. Pimpinan SKPD menyusun Perjanjian Kinerja kemudian ditandatangani oleh Bupati/ Walikota dan Pimpinan SKPD.

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati/Walikota dan Pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya, maka dapat di simpulkan bahwa: Implementasi Kebijakan e-Sakip di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado yang menggunakan analisis Implementasi Kebijakan menurut George Edward III dinilai berhasil, karena pengukuran kinerja di Dinas Pengendalian penduduk dan KB mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018 mencapai nilai prosentase lebih dari 90 atau bisa dibilang sangat tinggi. Peningkatan hasil prosentase Pengukuran kinerja di Dinas PPKB menggambarkan bahwa Dinas tersebut memiliki reputasi yang baik sehingga mampu menambah pengukuran kinerja

di setiap tahunnya. Dalam variable Komunikasi, kerja sama dalam berbagi informasi antara kasubag perencanaan dan operator bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan kebijakan yang ada. Variable sumber daya, yang terbagi dua bagian, yaitu sumber daya manusia dan anggaran dalam sumber daya manusia yang ada di Dinas PPKB sudah sangat cukup sehingga dalam proses penginputan data tidak ditemukan masalah yang serius. Mengenai anggaran, anggaran yang dikeluarkan untuk e-Sakip hanya berupa pengadaan fasilitas seperti laptop yang merupakan bagian yang sangat penting dalam terlaksananya tujuan e-Sakip. Variable Disposisi/Sikap, dalam penginputan data mereka telah mengisi data dengan jujur tanpa ada manipulasi sehingga tingkat komitmen loyalitas pegawai telah mengikuti pelaksanaan aturan e-Sakip dengan baik. Yang terakhir Variable Struktur Birokrasi, tata laksana pemerintah yang baik merupakan proses yang diberlakukan dalam instansi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut tata laksana kebijakan e-Sakip di Dinas PPKB sudah sesuai dengan struktur yang ada.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dibahas dalam skripsi ini, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

Sesuai dengan fokus penelitian yang berstandar pada empat variable keberhasilan Implementasi Kebijakan menurut George Edward III peneliti berpendapat bahwa meskipun sumber daya manusia di Dinas PPKB bisa dibilang sudah baik tetapi mereka harus tetap Meningkatkan kualitas SDM pegawai Dinas PPKB khususnya Operator e-Sakip mengadakan pelatihan

seperti workshop dan seminar-seminar, agar kapasitas dan kualitas kemampuan pegawai semakin baik dan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Anthony, R. N. Dan Govindarajan. 2003. Sistem Pengendalian Manajemen. Penerbit Salemba Empat Edisi: 1 Buku 2.
- Anastasia Diana, Lilis Setiawati, 2011. Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Prosedur dan Penerapan. Edisi 1. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Bambang Wahyudi. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Buku 1, Cetakan ketiga, CV. Bandung : Sulita.
- Creswell, J. W. 2010. Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto I. 2017. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Fahmi, Irham. 2013. Manajemen Kinerja, Teori dan Aplikasinya. Bandung: Alfabeta.
- Musanef. R. 2007. Manajemen Kepegawaian di Indonesia, Jakarta: Gunung Agung.
- Parsons, Wayne. 1995. Publik Policy: An Introduction To The Theory And Practice Of Policy Analysis. US: Edward Elgar Publishing Company.
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Tim Studi Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2000, Pengukuran Kinerja Suatu Tinjauan Pada Instansi Pemerintah. Edisi 1. Jakarta.
- Widjaja. A. W. 2006. Administrasi Kepegawaian, Jakarta: Rajawali. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Walikota Manado Nomor 22 A Tahun 2014 Tentang Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Manado Dengan Aplikasi e-Musrenbang, e-Monev dan e-Sakip
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Lembaga Adminstrasi Negara. 2003. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Pedoman Evaluasi SAKIP <http://pemerintah.net/sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah/>
- LAN dan BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Penerbit LAN.
- Marzuki, Ismail. 2015. Skripsi "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kab Gresik". Ilmu Pemerintahan:UMM Hal.15.
- Saputra, H. 2017. Pengembangan Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Untuk Dinas Perindustrian Kota Malang. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. 1 (10) : 1167-1175.
- Purnomo, I. D. 2018. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Polri Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Polda Jateng). Jurnal Hukum Khaira Ummah. 13 (1) : 229-238.
- Assa, Y. J. J. 2019. Analisis Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Dinas Pariwisata Kota
Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going
Concern*. 14 (1) : 194-204.

Palenga, F. H. 2017. Evaluasi
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (Studi Pada Biro
Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah). *Jurnal Katalogis*. 5
(1) : 172-181.

Supriati, A. 2016. Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah: Suatu Studi
Fenomenologi di Kota Manado
Sulawesi Utara. *Jurnal Aplikasi
Manajemen*. 14 (3) : 585-594.

